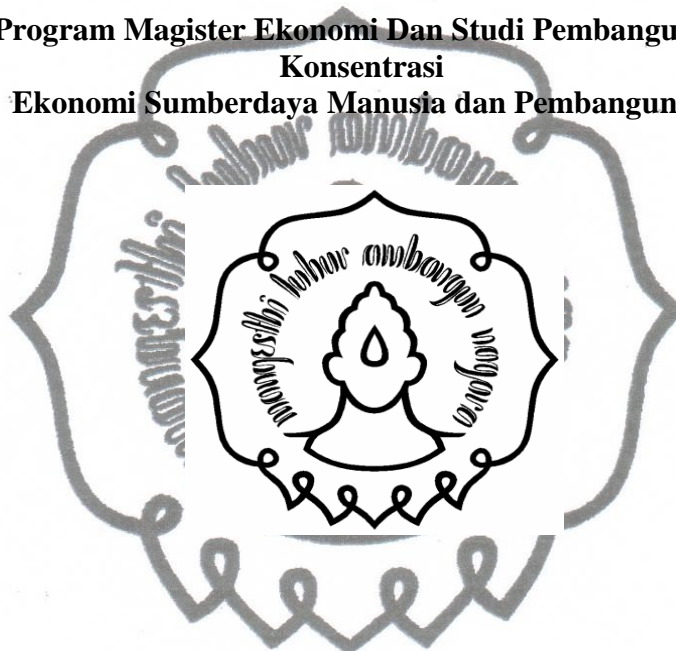


**ANALISIS KOMODITI UNGGULAN SEKTOR PERTANIAN
SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN SRAGEN**

Tesis

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S – 2

**Program Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan
Konsentrasi
Ekonomi Sumberdaya Manusia dan Pembangunan**



Oleh:

**SUPRAPTO
S4209042**

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010**

commit to user

Halaman Persetujuan Pembimbing

**ANALISIS KOMODITI UNGGULAN SEKTOR PERTANIAN
SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN SRAGEN**

**Disusun Oleh :
SUPRAPTO
S 4209042**

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Pada tanggal : _____

Pembimbing I



Dr. Guntur Riyanto, M.Si
NIP. 19580927 198601 1 001

Pembimbing II



Drs. Kresno Saroso Pribadi, M.Si
NIP. 19560118 198601 1 001

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan



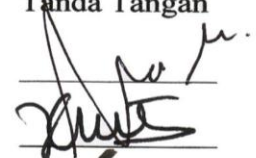
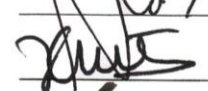
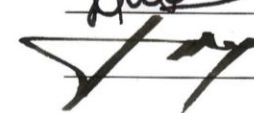
Dr. J. J. Sarungu. MS
NIP. 19510701 198010 1 001

Halaman Persetujuan Penguji

**ANALISIS KOMODITI UNGGULAN SEKTOR PERTANIAN
SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN SRAGEN**

Disusun Oleh :
SUPRAPTO
S4209042

Telah disetujui dan di sahkan oleh Tim Penguji
Pada tanggal : _____

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Dr.Ir.Kusnandar, M.Si	
Pembimbing Utama	Dr. Guntur Riyanto. M.Si	
Pembimbing Pendamping	Drs.Kresno Saroso Pribadi,M.Si	


Mengetahui,

Direktur PPs UNS




Prof. Dr. Suranto. M.Sc., Ph.D
NIP. 19570820 198503 1 004

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Studi
Dan Pembangunan



Dr. J.J. Sarungu. MS
NIP. 19510701 198010 1 001

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **SUPRAPTO**

NIM : **S 4209042**

Program Studi : Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan

Minat Utama : **Ekonomi Sumberdaya Manusia dan Pembangunan**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain.

Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan Penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam tesis ini dan disebutkan sebagai Daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta,

Tertanda,

SUPRAPTO
S4209042

commit to user

INTISARI

ANALISIS KOMODITI UNGGULAN SEKTOR PERTANIAN SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN

Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui komoditi pertanian yang menjadi unggulan ekonomi di Kabupaten Sragen sebelum dan setelah Otonomi Daerah, 2) untuk mengetahui komoditi pertanian yang dapat diprioritaskan untuk dikembangkan di Kabupaten Sragen sebelum dan setelah Otonomi Daerah.

Penelitian komoditi unggulan sektor pertanian Kabupaten Sragen menganalisa pada tahun 1997 sampai 2008. Periode 1997 – 2000, merupakan periode sebelum diterapkan Otonomi Daerah dan periode 2001 – 2008 merupakan periode selama diterapkan Otonomi Daerah. Teknik analisis data menggunakan empat analisis yaitu 1) Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk menentukan subsektor unggulan atau ekonomi basis suatu perekonomian wilayah, 2) Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dengan Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs), 3) Analisis Overlay untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi berdasarkan kriteria pertumbuhan (RPs) dan kriteria kontribusi.

Hasil analisis *Location Quotients* pada masa sebelum diterapkan otonomi daerah tahun 1997-2000, komoditi yang teridentifikasi sebagai komoditi basis di Kabupaten Sragen, yaitu subsektor tanaman bahan makanan terdiri dari padi, jagung dan kacang hijau dan ketiga tanaman tersebut dapat dipertahankan selama otonomi daerah tahun 2001 – 2008. Hasil analisis MRP diketahui bahwa komoditi yang pada tingkat Propinsi Jawa Tengah memiliki pertumbuhan yang menonjol, tetapi di tingkat Kabupaten Sragen kurang menonjol, pada masa sebelum diterapkan otonomi daerah yaitu subsektor tanaman bahan makanan meliputi jagung dan kacang tanah dan selama otonomi daerah 2001 – 2008 subsektor tanaman bahan makanan meliputi jagung, kacang tanah dan kacang hijau memiliki pertumbuhan yang baik pada tingkat provinsi Jawa Tengah selama otonomi daerah. Hasil analisis *Overlay* menunjukkan bahwa pada masa sebelum diterapkan otonomi daerah komoditi dominan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sragen belum ada, dan selama otonomi daerah tahun 2001 – 2008 kedelai menjadi komoditi pada tingkat Jawa Tengah memiliki pertumbuhan yang kurang menonjol tetapi di Kabupaten Sragen memiliki pertumbuhan yang menonjol.

Kata Kunci :

Sektor Pertanian, Otonomi Daerah, dan Kabupaten Sragen.

ABSTRACT**ANALISIS KOMODITI UNGGULAN SEKTOR PERTANIAN
SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN SRAGEN**

The purpose of this study a) to determine who became eminent agricultural commodities in the economy before and after the Sragen Regency Autonomy, 2) to assess the agricultural commodities that can be prioritized for development in Sragen regency before and after the Autonomous Region.

Agricultural commodity research Sragen analyzed in 1997 until 2008. Period 1997 - 2000, a period prior to implementation of Regional Autonomy and the period 2001 - 2008 was a period during the applicable Regional Autonomy. Data were analyzed using four analysis: 1) Location Analysis Quotient (LQ) was used to determine the economic sub-sector or the base of a regional economy, 2) Model Growth Ratio (MRP) with Reference Regional Growth Ratio (RPR) and the Regional Growth Ratio Studies (RPS), 3) Analysis of Overlay to view the description of economic activities based on the criteria of growth (RPS) and the criteria for contributions.

Location Quotients analysis results in the period prior to implementation of regional autonomy in 1997-2000, identified the commodity as a commodity base in Sragen Regency, namely food crops sub-sector consists of rice, corn and green beans and three plants could be maintained for regional autonomy in 2001 - 2008. Results of analysis of MRP in mind that the commodity at the level of Central Java Province, has an outstanding growth, but at levels less prominent Sragen regency, during the period prior to implementation of regional autonomy which food crops include corn and peanuts and autonomy during 2001 - 2008 crops foodstuffs including corn, peanuts and green beans have good growth at the provincial level INVESTOR Java for regional autonomy. Overlay analysis results show that in the days before the regional autonomy applied dominant commodity that can be developed in Sragen Regency has not been there, and for regional autonomy in 2001 - 2008 soybean become commodities in Central Java has a growth rate that is less prominent but in Sragen Regency has an outstanding growth

Keywords:

Agricultural Sector, Local Autonomy, and Sragen.

MOTTO

- **Sesungguhnya Rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (Q.S.Al A'Arif 56)**
- **Tetapkan pikiranmu pada apa yang sudah menjadi cita-citamu, sanubarimu tidak akan salah menunjukkan untuk mencapainya (intisari).**



commit to user

PERSEMBAHAN

Kesabaran untuk karya kecil ini ku persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu terhormat
2. Istri dan anak-anakku tersayang
3. Adikku dan seluruh keluarga
4. Teman-teman Almamaterku Magister Studi Ekonomi dan Pembangunan.



commit to user

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Pemurah atas rahmat dan anugerah yang penulis rasakan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul :

Analisis komoditi Unggulan Sektor Pertanian sebelum dan selama otonomi daerah di Kabupaten Sragen

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, terlebih kebatasan penulis dalam wawasan dan pengalaman terkait obyek yang diteliti. Namun demikian harapan kami semoga Tesis ini bermanfaat bagi pembaca yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

Dalam penyusunan Tesis ini berbagai kendala dihadapi penulis, namun demikian rasanya menjadi ringan ketika ketulusan-ketulusan hadir dari berbagai pihak yang mengulurkan bantuan kepada penulis. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. JJ. Sarungu, MS selaku Direktur Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret beserta Staf Pengelola.
2. Dr. Guntur Riyanto, M.Si selaku Pembimbing I yang memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
3. Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si selaku Pembimbing II yang dengan penuh perhatian dan kesabaran senantiasa memberi dorongan serta meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
4. Segenap Dosen Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Segenap Karyawan dan Karyawati Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Kepala Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen
7. Istriku tercinta yang telah menyemangati, memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus untuk penulis.
8. Anak-anakku yang mendukung doa.

commit to user

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, yang telah membantu keberhasilan penyusunan Tesis ini.

Surakarta, Agustus 2010

Penulis



commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRACT	v
INTISARI	vi
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS	8
A. Teori	8
1. Pembangunan Ekonomi	8
a. Pembangunan Daerah	9
b. Teori Ekonomi Pembangunan Ekonomi Daerah	11
2. Konsep Ekonomi Daerah	18
a. Tujuan Ekonomi Daerah	19
b. Landasan Ekonomi Daerah	21
3. Kebijakan Optimal Prioritas Sektoral	23
4. Pengembangan Sektor Potensial	24

commit to user

B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Pemikiran	28
D. Hipotesis	30
BAB III : METODE PENELITIAN	31
A. Ruang Lingkup Penelitian	31
B. Jenis Dan Sumber Data	31
C. Teknik Analisis Data	31
1. Analisis LQ	31
2. Model Rasio Pertumbuhan	33
3. Analisis Overlay	36
D. Definisi Operasional	37
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	38
1. Kondisi Geografis Sragen	38
2. Kependudukan	39
3. Pertanian	42
B. Hasil Analisis	44
1. Analisis LQ	44
2. Analisis MRP	46
3. Analisis Overlay	48
C. Pembahasan	50
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
C. Implikasi Manajerial	60
D. Keterbatasan Penelitian	60

DAFTAR PUSTAKA

61



commit to user

ABSTRAKSI**ANALISIS KOMODITI UNGGULAN SEKTOR PERTANIAN
SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN SRAGEN**

Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui komoditi pertanian yang menjadi unggulan ekonomi di Kabupaten Sragen sebelum dan setelah Otonomi Daerah, 2) untuk mengetahui komoditi pertanian yang dapat diprioritaskan untuk dikembangkan di Kabupaten Sragen sebelum dan setelah Otonomi Daerah.

Penelitian komoditi unggulan sektor pertanian Kabupaten Sragen menganalisa pada tahun 1997 sampai 2008. Periode 1997 – 2000, merupakan periode sebelum diterapkan Otonomi Daerah dan periode 2001 – 2008 merupakan periode selama diterapkan Otonomi Daerah. Teknik analisis data menggunakan empat analisis yaitu 1) Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk menentukan subsektor unggulan atau ekonomi basis suatu perekonomian wilayah, 2) Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dengan Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs), 3) Analisis Overlay untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi berdasarkan kriteria pertumbuhan (RPs) dan kriteria kontribusi.

Hasil analisis *Location Quotients* pada masa sebelum diterapkan otonomi daerah tahun 1997-2000, komoditi yang teridentifikasi sebagai komoditi basis di Kabupaten Sragen, yaitu subsektor tanaman bahan makanan terdiri dari padi, jagung dan kacang hijau dan ketiga tanaman tersebut dapat dipertahankan selama otonomi daerah tahun 2001 – 2008. Hasil analisis MRP diketahui bahwa komoditi yang pada tingkat Propinsi Jawa Tengah memiliki pertumbuhan yang menonjol, tetapi di tingkat Kabupaten Sragen kurang menonjol, pada masa sebelum diterapkan otonomi daerah yaitu subsektor tanaman bahan makanan meliputi jagung dan kacang tanah dan selama otonomi daerah 2001 – 2008 subsektor tanaman bahan makanan meliputi jagung, kacang tanah dan kacang hijau memiliki pertumbuhan yang baik pada tingkat provinsi Jawa Tengah selama otonomi daerah. Hasil analisis *Overlay* menunjukkan bahwa pada masa sebelum diterapkan otonomi daerah komoditi dominan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sragen belum ada, dan selama otonomi daerah tahun 2001 – 2008 kedelai menjadi komoditi pada tingkat Jawa Tengah memiliki pertumbuhan yang kurang menonjol tetapi di Kabupaten Sragen memiliki pertumbuhan yang menonjol.

Kata Kunci :

Sektor Pertanian, Otonomi Daerah, dan Kabupaten Sragen.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Kebijakan pembangunan sesuai dengan UU No. 22/1999 telah memberikan arahan bahwa sebagian besar urusan dan tanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan diserahkan kepada pemerintah daerah. Pada hakekatnya kebijakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pemerintah daerah masing-masing memiliki kemampuan dan kapasitas untuk merencanakan dan mengelola pembangunan secara mandiri serta lebih mengenal dan mengetahui potensi serta keunggulan daerahnya. Dalam pelaksanaannya UU No. 22/1999 yang dikaitkan dengan UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, memberikan ruang yang cukup luas bagi pemerintah daerah dalam penanganan urusan pemerintah di tingkat lokal, penyelesaian permasalahan daerah dan dapat lebih kreatif menggali dan mengembangkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang baik, secara material dan spiritual (Todaro, 2000).

commit to user

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia merupakan hakekat pembangunan. Pembangunan mencakup: pertama, kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, dan lain-lain; kedua, kebutuhan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat; ketiga, kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial (Salim, 1986).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincoln, 1999).

Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak dan nelayan, memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri serta memperluas pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Tujuan pembangunan pertanian layak ditempatkan sebagai prioritas utama agar tercapainya swasembada pangan.

Pembangunan pertanian mengupayakan untuk mengembangkan potensi yang ada, yaitu memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal. Pertanian tidak lagi dianggap sebagai usaha tradisional yang berskala kecil, dan apabila dikelola dengan baik produk yang dihasilkan akan mempunyai kualitas yang mampu bersaing, sehingga sangat menguntungkan bagi perekonomian Indonesia.

Sektor pertanian diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti dalam peningkatan pendapatan nasional. Sektor ini berperan sebagai sumber penghasil bahan pangan, sumber bahan baku bagi industri, mata pencaharian sebagian besar penduduk, penghasil devisa negara dari ekspor komoditasnya bahkan berpengaruh besar terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Penduduk Indonesia yang sebagian besar penghasilannya bergantung pada bidang pertanian, namun tingkat produksinya tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Penyebabnya adalah pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia serta penggalian potensi alam pertanian yang kurang optimal.

Peranan sektor pertanian di Indonesia sangat penting karena dilihat dari keharusannya memenuhi kebutuhan pangan penduduk pada tahun 2005 yang berjumlah 219,3 juta dan diprediksikan akan bertambah sebesar 1,25 persen (Purwaningsih, 2008).

Program peningkatan bahan pangan dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri dari produksi pangan nasional. Unsur-unsur dari ketahanan pangan antara lain tersedianya pangan dan aksesabilitas masyarakat terhadap bahan pangan. Jumlah penduduk yang cukup tinggi selalu menggantungkan penyediaan bahan pangan dari pasar nasional sehingga tidak ada pilihan lain untuk berusaha membangun sistem ketahanan pangan yang kokoh pada keragaman sumber bahan pangan lokal. Ketersediaan dan kecukupan pangan mencakup kuantitas dan kualitas bahan pangan sedangkan aksesabilitas adalah kemampuan bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pangan karena didukung pemasaran yang efektif dan efisien.

Pemerintah harus melaksanakan kebijakan pangan yaitu menjamin ketahanan pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi, keamanan, kelembagaan, dan organisasi pangan. Kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan kemandirian pangan. Pembangunan yang dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduknya selalu mengabaikan keswadayaan, akan bergantung pada negara lain dan menjadi negara yang tidak berdaulat (Purwaningsih, 2008).

Sektor pertanian mempunyai peranan penting baik di tingkat nasional maupun regional, namun peranan tersebut belum sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang menceminkan proses transformasi struktural. Penurunan ini disebabkan oleh interaksi dari berbagai proses yang bekerja antara lain disisi permintaan, penawaran, dan pergeseran kegiatan. Penurunan sektor pertanian tidak berarti menyebabkan sektor ini kurang berarti. (Ikhsan dan Annan, 1993 dalam Ropingi dan Agustono, 2006).

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara masih sangat besar. Sebagian besar penduduk Indonesia masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Turunnya sektor pertanian dalam menyumbangkan output nasional dan penyediaan lapangan pekerjaan bukan berarti sektor pertanian mengalami stagnasi, bahkan mengalami perkembangan yang dinamis. Sektor pertanian merupakan penopang bagi sektor-sektor perekonomian lainnya sehingga pembangunan ekonomi tidak dapat berpaling dari sektor ini. (Nuning dan Sundari, 2005).

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam perspektif ekonomi makro. Pertama, sektor pertanian merupakan sumber pertumbuhan output nasional. Studi Herliana (2004) menunjukkan sektor pertanian memberikan kontribusi 19,1%

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari keseluruhan sektor perekonomian Indonesia, walaupun secara kuantitas lebih kecil jika dibanding dengan kontribusi sektor jasa (43,5%) dan manufaktur (23%) namun sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja terbesar yakni 47%. Kedua, sektor pertanian memiliki karakteristik yang spesifik khususnya dalam hal ketahanan terhadap guncangan struktural dari perekonomian makro (Simatupang dan Dennyredjo, 2003 dalam Irawan, 2005).

Saat ini Departemen Pertanian telah menetapkan berbagai program prioritas diantaranya adalah Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS), dan Program Pengembangan Kawasan Hortikultura (PKH). Oleh pemerintah pusat, Provinsi Jawa Tengah mendapat tugas untuk menjadi salah satu provinsi utama dalam mendukung keberhasilan program tersebut, karena potensi wilayah dinilai memadai.

Dalam pengembangannya diperlukan pendekatan pembangunan yang mengacu pada komoditas unggulan, kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, kelestarian lingkungan serta sistem agribisnis. Pendekatan pembangunan pertanian yang mempertimbangkan hal tersebut salah satunya adalah pengembangan kawasan agropolitan.

Agar pembangunan pertanian di Jawa Tengah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka perlu mempertimbangkan kebijakan yang terkait dengan Undang – Undang Otonomi Daerah. Dalam kaitannya dengan kewenangan pembangunan pertanian, maka pemerintah daerah mempunyai peluang yang cukup luas dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pembangunan pertanian sesuai dengan permasalahan, potensi dan karakter daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis mengenai komoditas unggulan sektor pertanian di Kabupaten Sragen sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan ekonomi daerah, sehingga fokus penelitian ini adalah komoditas unggulan sektor pertanian sebelum dan selama otonomi daerah di Kabupaten Sragen.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Komoditas pertanian apa saja yang menjadi unggulan ekonomi di Kabupaten Sragen sebelum dan selama Otonomi Daerah ?
2. Komoditas pertanian apa saja yang dapat diprioritaskan untuk dikembangkan di Kabupaten Sragen sebelum dan selama Otonomi Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui komoditas pertanian yang menjadi unggulan ekonomi di Kabupaten Sragen sebelum dan selama Otonomi Daerah.
2. Untuk mengetahui komoditas pertanian yang dapat diprioritaskan untuk dikembangkan di Kabupaten Sragen sebelum dan selama Otonomi Daerah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Bagi pengambil kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan didalam merumuskan strategi dan kebijaksanaan pembangunan di Kabupaten Sragen.
2. Sebagai bahan referensi atau masukan bagi peneliti lain yang mempunyai permasalahan yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori

1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan ekonomi mempunyai pengertian :

(1) Suatu proses perubahan yang terjadi secara terus menerus, (2) Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, (3) Kenaikan pendapatan perkapita berlangsung dalam jangka panjang (4) Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya. Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari aspek yaitu: aspek perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan perbaikan di bidang regulasi (baik formal maupun informal). (Lincolyn, 1999). Pembangunan sebagai pergerakan keatas dari seluruh sistem sosial yang menekankan pada pentingnya pertumbuhan dengan perubahan khususnya perubahan nilai-nilai dan kelembagaan. (Kuncoro, 2004). Tiga nilai pokok dalam keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu :

(2) Ketahanan (*Sustenance*) merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, papan, kesehatan, proteksi untuk mempertahankan hidup.

commit to user

- (3) Harga diri (*Self Esteem*) merupakan pembangunan yang seharusnya memanusiakan orang. Pengertian dalam arti luas pembangunan suatu daerah seharusnya meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah atau wilayah tersebut.
- (4) *Freedom from servitude* merupakan kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

a. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincoln, 1999). Tiga pengertian daerah berdasarkan aspek ekonomi yaitu (Lincoln, 1999):

- 1) Daerah Homogen adalah daerah yang dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam pelosok ruang terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan per kapita, sosial-budayanya, geografis, dan sebagainya.
- 2) Daerah Nodal adalah suatu daerah yang dianggap sebagai suatu ruang ekonomi yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi.
- 3) Daerah Perencanaan atau Daerah Administrasi adalah suatu daerah yang ruang ekonomi berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu

propinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Jadi daerah ini berdasarkan pada pembagian administrasi suatu negara.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah).

Ada empat peran yang diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu (Lincoln, 1999)

1) Entrepreneur

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri (BUMD). Pemerintah daerah harus dapat mengelola aset-aset dengan lebih baik sehingga secara ekonomis dapat menguntungkan.

2) Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Pemerintah daerah bisa mengikutsertakan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat dalam proses penyusunan sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan strategi.

3) Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini dapat mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (*zoning*) yang lebih baik.

4) Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus. Hal ini dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada sebelumnya tetap berada di daerah tersebut.

b. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Saat ini tidak ada satu teori pun yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Namun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial dapat membantu bagaimana memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakikatnya, inti dari teori-teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu (Lincoln 1999).

Pengembangan metode untuk menganalisis suatu perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaanya sebagai sarana mengumpulkan data tentang perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya.

Pengembangan metode analisis ini kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil guna mempercepat laju pertumbuhan yang ada. Akan tetapi di pihak lain harus diakui, menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit (Lincoln, 1999).

Beberapa faktor yang sering menjadi penghambat dalam melakukan analisis perekonomian diantaranya:

- 1) Data tentang daerah sangat terbatas terutama kalau daerah dibedakan berdasarkan pengertian daerah *nodal* (berdasarkan fungsinya).
- 2) Data yang dibutuhkan umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk analisis daerah, karena data yang terkumpul biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan analisis perekonomian secara nasional.
- 3) Data tentang perekonomian daerah sangat sukar dikumpulkan sebab perekonomian daerah lebih terbuka jika dibandingkan dengan perekonomian nasional. Hal tersebut menyebabkan data tentang aliran-aliran yang masuk dan keluar dari suatu daerah sukar diperoleh.
- 4) Bagi Negara Sedang Berkembang, disamping kekurangan data sebagai kenyataan yang umum, data yang terbatas itu pun banyak yang kurang akurat dan terkadang relatif sulit dipercaya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk melakukan analisis yang memadai tentang keadaan perekonomian yang sebenarnya di suatu daerah.

Para ahli mengemukakan berbagai teori tentang pembangunan daerah antara lain (Lincoln, 1999).

1) Teori Ekonomi Neo Klasik

Konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi. Sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah apabila modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah.

2) Teori Basis Ekonomi (*Economics Base Theory*)

Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Harry W. Richardson (1973) yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Lincoln 1999). Dalam penjelasan selanjutnya dijelaskan bahwa pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*). Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyatno 2000).

Ada serangkaian teori ekonomi sebagai teori yang berusaha menjalankan perubahan-perubahan regional yang menekankan hubungan antara sektor-sektor yang terdapat dalam perekonomian daerah. Teori yang paling sederhana dan populer adalah teori basis ekonomi (*economic base theory*). Menurut Glasson (1990), konsep dasar basis ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sektor yaitu:

commit to user

- (1) Sektor-sektor Basis adalah sektor-sektor yang mengekspor barang-barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masukan barang dan jasa mereka kepada masyarakat yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Sektor-sektor Bukan Basis adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat bersangkutan. Sektor-sektor tidak mengekspor barang-barang. Ruang lingkup mereka dan daerah pasar terutama adalah bersifat lokal.

Secara implisit pembagian perekonomian regional yang dibagi menjadi dua sektor tersebut terdapat hubungan sebab-akibat dimana keduanya kemudian menjadi pijakan dalam membentuk teori basis ekonomi. Bertambahnya kegiatan basis di suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan sehingga menambah permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan, akibatnya akan menambah volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya semakin berkurangnya kegiatan basis akan menurunkan permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis yang berarti berkurangnya pendapatan yang masuk ke daerah yang bersangkutan. Dengan demikian kegiatanbasis mempunyai peran sebagai penggerak utama.

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa fakta penentu utama dari pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya hubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-

industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk: tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja.

Teori basis ekonomi membagi kegiatan ekonomi ke dalam dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan sektor basis merupakan kegiatan suatu masyarakat yang hasilnya berupa barang dan jasa yang ditujukan untuk ekspor keluar, regional, nasional, dan internasional. Kegiatan sektor non basis merupakan kegiatan masyarakat yang hasilnya berupa barang dan jasa yang diperuntukkan bagi masyarakat itu sendiri dalam kawasan kehidupan ekonomi masyarakat tersebut (Hendayana, 2003).

Penekanan terhadap arti penting bantuan (*aid*) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional merupakan strategi dari pembangunan daerah. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan atau batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut.

Ketergantungan yang tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global merupakan kelemahan dari model ini. Model ini juga berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi.

3) Teori Lokasi

Teori ini mengatakan bahwa lokasi mempengaruhi pertumbuhan daerah khususnya bila dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Pemilihan lokasi yang tepat seperti memaksimalkan peluangnya untuk mendekati pasar lebih dipilih oleh perusahaan karena dapat meminimumkan biaya. Model pengembangan industri kuno menyatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya termurah antara bahan baku dengan pasar. Keterbatasan dari teori lokasi ini adalah teknologi dan komunikasi modern yang telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang.

4) Teori Tempat Sentral

Teori Tempat Sentral (*central place theory*) menganggap bahwa ada hirarki tempat dimana setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Teori tempat sentral memperlihatkan bagaimana pola-pola lahan dari industri yang berbeda-beda terpadu membentuk suatu sistem regional kota-kota. (Supomo 2000).

Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Misalnya, perlunya melakukan pembedaan fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga (berbatasan). Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan daerah lainnya hanya sebagai wilayah

pemukiman. Seorang ahli pembangunan ekonomi daerah dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan peranan fungsional mereka dalam sistem ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi daerah di perkotaan maupun di pedesaan dapat menerapkan teori ini, misal perlu pembedaan fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga (berbatasan). Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan lainnya hanya sebagai daerah pemukiman.

5) Teori interaksi spasial

Merupakan arus gerak yang terjadi antara pusat-pusat pelayanan baik berupa barang, penduduk, uang maupun yang lainnya. Untuk itu perlu adanya hubungan antar daerah satu dengan yang lain karena dengan adanya interaksi antar wilayah maka suatu daerah akan saling melengkapi dan bekerja sama untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya.

Dalam teori ini didasarkan pada teori gravitasi, dimana dijelaskan bahwa interaksi antar dua daerah merupakan perbandingan terbalik antara besarnya massa wilayah yang bersangkutan dengan jarak keduanya.

Dimana massa wilayah diukur dengan jumlah penduduk. Model interaksi spasial ini mempunyai kegunaan untuk:

- (1) Menganalisa gerakan antar aktivitas dan kekuatan pusat dalam suatu daerah.

- (2) Memperkirakan pengaruh yang ada dan ditetapkannya lokasi pusat pertumbuhan terhadap daerah sekitarnya.

Interaksi antar kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lain sebagai produsen dan konsumen serta barang-barang yang diperlukan menunjukkan adanya gerakan. Produsen suatu barang pada umumnya terletak pada tempat tertentu dalam ruang geografis, sedangkan para langganannya tersebar dengan berbagai jarak di sekitar produsen.

6) Teori Kausasi Kumulatif

Teori kausasi kumulatif menunjukkan kondisi daerah sekitar kota semakin buruk. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperoleh kesenjangan antara daerah-daerah tersebut (maju versus terbelakang). Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lainnya.

7) Model Daya Tarik

Teori daya tarik industri merupakan model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasari adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pembelian subsidi dan insentif.

2. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi Daerah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani "autos" yang berarti sendiri dan "nomos" yang berarti aturan. Daerah otonom sebagai

kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pengertian otonomi daerah dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan dalam Undang-Undang tersebut adalah pemberian kewenangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

a. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan Otonomi Daerah menurut Undang - Undang no 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah adalah Otonomi Daerah diarahkan untuk memacu pemerataan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberi peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Di era otonomi daerah dan globalisasi yang sedang terjadi, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali potensi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Tujuannya untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki suatu daerah, sehingga akan lebih cepat dan tanggap dalam

menyusun strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sasaran pembangunan akan terwujud apabila pemerintah daerah mengetahui potensi daerah dan kawasan andalan serta merumuskan strategi kebijakan pengembangan produk atau komoditas basis ekonominya. (Ropingi dan Agustono, 2007).

Pemerintah daerah dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, mampu bersaing dengan tenaga dari luar daerah dan mampu untuk mengolah potensi daerah. Sumber daya manusia yang tidak atau belum berkualitas dapat menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti adanya konflik dan penyelewengan yang diwarnai kepentingan pribadi dan kelompok. Sumber daya manusia sebagai pelaksana dari otonomi daerah harus manusia yang berkualitas karena nantinya akan menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah membawa pemerintah daerah dituntut untuk lebih pro aktif dalam menggali potensi yang ada didaerahnya. Namun ada kecenderungan bagi pemerintah daerah untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Rusaknya sumber daya alam disebabkan karena keinginan dari pemerintah daerah unruk menghimpun pendapatan daerah dimana sumber daya alam yang potensial dieksploitasi secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan dampak negatif atau kerusakan lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penyelenggaraan pemerintah daerah di berbagai daerah yang mementingkan kepentingannya sendiri akan menciptakan ego daerah yang

commit to user

tinggi. Hal ini akan membawa dampak negatif dari otonomi daerah yaitu setiap daerah mempunyai kebebasan untuk mengelola pemerintah daerah sesuai dengan kehendak dan aspirasi daerah sendiri yang cenderung keluar dari konsep NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Pelaksanaan otonomi daerah semakin memperluas kewenangan daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan di daerahnya. Konsekuensi dari semakin meluasnya kewenangan, tugas dan tanggung jawab, suatu daerah harus merespon untuk segera menetapkan suatu pandangan baru perencanaan pembangunan sebagai suatu konsep dasar untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan sesuai kondisi daerah.

Kebijakan otonomi daerah yang lebih luas membuat kewenangan daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan di daerah semakin meluas. Perhatian pemerintah daerah harus diperlukan untuk menghasilkan perencanaan daerah yang dapat berperan sebagai dasar kebijakan pembangunan ekonomi. Para perencana daerah diharapkan mampu menyusun rencana-rencana pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal (Aziz; 2008).

b. Landasan Otonomi Daerah

Kebijakan otonomi daerah berakar dari konsep tentang desentralisasi yaitu pelimpahan sebagian wewenang yang dimiliki pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Konsep desentralisasi merupakan kebalikan

dari sistem sentralisasi. di mana seluruh kewenangan dikuasai oleh pemerintah pusat.

Ciri-ciri dari teori desentralisasi adalah pemerintah lokal harus diberi otonomi dan kebebasan, dan harus dianggap sebagai wilayah terpisah yang tidak mendapatkan kontrol langsung dari pemerintah pusat. Karakteristik lainnya adalah pemerintah lokal seharusnya memiliki batas-batas kewilayahan yang ditetapkan secara hukum, agar tataran administrasi sebuah pemerintah lokal mampu melaksanakan fungsi-fungsinya yang secara otomatis sinergis dengan pemerintah lokal lainnya dan memperoleh status kelembagaan yang jelas sekaligus wewenang kekuasaannya (Safi'i; 2007).

Kebijakan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah yang beraneka ragam. Kebijakan Otonomi Daerah ini memberikan wewenang yang lebih luas kepada daerah, yang diwujudkan dengan wewenang dalam pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah seperti yang tercantum dalam Undang-undang 22 tahun 1999 dan Undang-undang 25, tahun 1999.

Pada masa pemerintahan Orde Baru yang bersifat sentralistik, aparat daerah cenderung hanya menjadi pelaksana tugas pemerintah pusat tanpa kewenangan yang memadai. Keinginan untuk memperoleh kewenangan ini muncul pada era Otonomi Daerah ini. Salah satu kewenangan yang mendasar bagi pemerintah daerah adalah berupa kesempatan untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam kaitan ini Pemda

menerbitkan berbagai perda tentang pajak, retribusi dan pungutan lainnya. Disamping itu Pemda juga mengeluarkan berbagai kebijakan diseperti kegiatan usaha, terutama melalui pengaturan kegiatan perdagangan.

Pada dasarnya selain untuk meningkatkan PAD, perda dibuat untuk menertibkan dan memperlancar suatu aktivitas di daerahnya, tetapi pada prakteknya berbagai perda dan kebijakan tersebut menciptakan ekonomi biaya tinggi yang menghambat perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Akhirnya situasi ini akan mengganggu iklim usaha dan memperlemah daya saing usaha di Indonesia.

3. Kebijakan Optimal Prioritas Sektoral.

Lincoln (1999), berpendapat bahwa masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumber-sumber daya fisik secara lokal (daerah).

Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah dengan mengembangkan basis ekonomi

sektoral dan kesempatan kerja yang beragam. Untuk tujuan tersebut diperlukan adanya kebijakan prioritas sektoral dalam menentukan sektor-sektor yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan.

4. Pengembangan Sektor Potensial

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mengadakan tinjauan keadaan, permasalahan dan potensipotensi pembangunan (Tjokroaminoto 1995). Berdasarkan potensi sumber daya alam yang kita miliki, maka adanya sektor potensial di suatu daerah harus dikembangkan dengan seoptimal mungkin. Lincoln (1999:165) mengatakan bahwa sampai dengan akhir dekade 1980-an, di Indonesia terdapat tiga kelompok pemikiran dalam kaitannya dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memantapkan keberadaan sektor industri. Ketigakelompok pemikiran tersebut adalah:

- 1) Pengembangan sektor industri hendaknya diarahkan kepada sektor yang memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Pemikiran seperti ini boleh dikatakan diwakili oleh kalangan ekonom-akademis.
- 2) Konsep Delapan Wahana Transformasi Teknologi dan Industri yang di kemukakan oleh Menteri Riset dan Teknologi (Habiebie), yang pada dasarnya memprioritaskan pembangunan industri-industri hulu secara serentak (simultan).
- 3) Konsep keterkaitan antar industri, khususnya keterkaitan hulu-hilir. Konsep ini merupakan konsep menteri perindustrian.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Hendayana (2003) tentang Aplikasi Metode *Location Quotient* (LQ) Dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. Penentuan komoditas unggulan nasional dan daerah merupakan langkah awal menuju pembangunan pertanian yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi globalisasi perdagangan.

Untuk mengimplementasikan metoda LQ dalam penelitian Hendayana (2003) digunakan data areal panen tanaman pangan, hortikultura (sayuran dan buah-buahan), perkebunan dan populasi ternak, masing-masing data series selama kurun waktu lima tahun (1997 – 2001).

Hasil penelitian Hendayana (2003) menemukan bahwa 1) Metoda LQ sebagai salah satu pendekatan model ekonomi basis, relevan dan dapat digunakan sebagai salah satu teknik untuk mengidentifikasi penyebaran komoditas pertanian. Dalam hal ini komoditas yang memiliki nilai $LQ > 1$ dianggap memiliki keunggulan komparatif karena tergolong basis. Komoditas pertanian yang tergolong basis dan memiliki sebaran wilayah paling luas menjadi salah satu indikator komoditas unggulan nasional, 2) perhitungan LQ baru didasarkan aspek luas areal panen atau areal tanam, maka keunggulan yang diperoleh baru mencerminkan keunggulan dari sisi penawaran, belum dari sisi permintaan. Untuk mendapatkan keunggulan dari penawaran dan permintaan analisis masih perlu dilanjutkan dengan memasukkan unsur ekonomi antara lain keragaan ekspor dan impor. 3) Metode LQ memiliki kelebihan dalam hal penyelesaiannya yang mudah dilakukan, akan tetapi juga memiliki keterbatasan terutama bila menyangkut wilayah yang acuannya tidak jelas.

Syafruddin, Kairupan, Negara, dan Limbongan, (2004) tentang Penataan Sistem Pertanian Dan Penetapan Komoditas Unggulan Berdasarkan Zona Agroekologi Di Sulawesi Tengah menemukan bahwa sistem pertanian yang efisien, berproduksi tinggi, dan berkelanjutan dapat dicapai antara lain dengan memanfaatkan sumber daya lahan berdasarkan karakteristik, kemampuan, dan kesesuaiannya.

Syafruddin, *et al.*, (2004) telah menemukan bahwa lahan sebagai modal dasar dan faktor penentu utama dalam sistem produksi pertanian perlu dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Oleh karena itu, penataan sistem pertanian dan penetapan komoditas unggulan pada setiap wilayah kabupaten perlu dilakukan agar produksi yang dihasilkan tetap tinggi dan dapat bersaing di pasaran, baik lokal maupun internasional. Konsep sistem pakar dapat digunakan dalam menata sistem pertanian dan menetapkan komoditas unggulan.

Hasil penelitian Syafruddin, *et al.*, (2004) pada delineasi peta zona agroekologi wilayah Sulawesi Tengah skala 1:250.000 didapatkan tujuh zona utama, empat sistem pertanian, dan beberapa jenis tanaman alternatif. Komoditas unggulan juga telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah kabupaten, yaitu kakao, jagung, bawang merah, sapi potong, serta perikanan laut.

Penelitian Mukhyi, (2007) tentang Analisis Peranan Subsektor Pertanian dan Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Propinsi Jawa Barat : Pendekatan Analisis IRIO (*Interregional Input-Output*). Penelitian ini membahas permasalahan sektor pertanian di Propinsi Jawa Barat dan sektor-sektor unggulan yang ada di Propinsi Jawa Barat kaitannya dengan pembangunan kawasan ekonomi,

dengan menggunakan pendekatan IRIO (*Interregional Input-Output*) yang merupakan metode pengembangan dari *Input-Output Analysis*.

Hasil penelitian Mukhyi, (2007) menunjukkan bahwa 1) Tingkat kontribusi margin sektor di Propinsi Jawa Barat adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian (pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan) yang mempunyai nilai di atas 10% dari total PDRBnya. Sektor industri pengolahan masuk dalam tahap semi industrialisasi karena nilainya di atas 20% dari total PDRB Jawa Barat. Dalam sektor pertanian ada satu subsektor tanaman bahan makanan masuk dalam tahap menuju proses industrialisasi. Sektor dan subsektor lainnya masih dalam tahap non industrialisasi. Secara nasional tingkat kontribusi margin sektor adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian (pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan) yang mempunyai nilai di atas 10% dari total PDB nasional. Sektor industri pengolahan masuk dalam tahap semi industrialisasi karena nilainya di atas 20% dari total PDB nasional. Produk-produk sekunder atau produk-produk lanjutan dari produk primer pertanian adalah pendukung dari sektor-sektor unggulan Propinsi Jawa Barat. Serta sektor dan subsektor lainnya selain sektor pertanian yang dalam golongan non industrialisasi. 2) Sektor yang memiliki nilai multiplier besar terhadap perekonomian secara nasional sesuai dengan sektor unggulan Propinsi Jawa Barat, yaitu subsektor peternakan dan hasil-hasilnya; subsektor industri makanan, minuman dan tembakau; subsektor industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya; subsektor industri kertas dan barang dari cetakan, subsektor industri semen; subsektor industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi; subsektor industri barang dari logam, subsektor industri lainnya; sektor listrik, gas dan air

bersih; sektor bangunan; subsektor hotel dan restoran; subsektor angkutan darat, subsektor angkutan air dan subsektor angkutan udara. 3) Sektor dan subsektor unggulan Propinsi Jawa Barat berdasarkan analisis IRIO adalah sektor industri pengolahan, sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Bila dilihat dari subsektornya adalah subsektor industri pengilangan minyak bumi; subsektor makanan, minuman dan tembakau; subsektor industri kertas dan barang dari cetakan; subsektor industri pupuk kimia dan barang dari karet dan mineral bukan logam; sektor bangunan dan subsektor hotel dan restoran. Tetapi dibandingkan dengan sektor dan subsektor unggulan secara nasional, maka sektor dan subsektor unggulan Propinsi Jawa Barat adalah subsektor makanan, minuman dan tembakau; subsektor industri kertas dan barang dari cetakan; subsektor industri pupuk kimia dan barang dari karet dan mineral bukan logam; sektor bangunan dan subsektor hotel dan restoran. Walaupun sektor pertanian bukan sektor unggulan akan tetapi menjadi pendorong dari sektor-sektor unggulan, yang merupakan proses lebih lanjut dari hasil produk-produk pertanian yang dilakukan proses produksi lagi yang bisa memberikan nilai tambah yang besar terhadap pendapatan daerah.

C. Kerangka Pemikiran

Adanya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah satu dengan daerah lainnya merupakan fenomena yang umum dijumpai, terutama di negara berkembang. Namun tentunya bukan sebuah alasan yang tepat untuk kemudian membiarkan situasi tersebut terus berlangsung. Perbedaan tingkat pembangunan tersebut dipengaruhi oleh banyak hal seperti ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja, luas daerah, pasar ekspor, kebijakan pemerintah dan faktor-faktor lainnya.

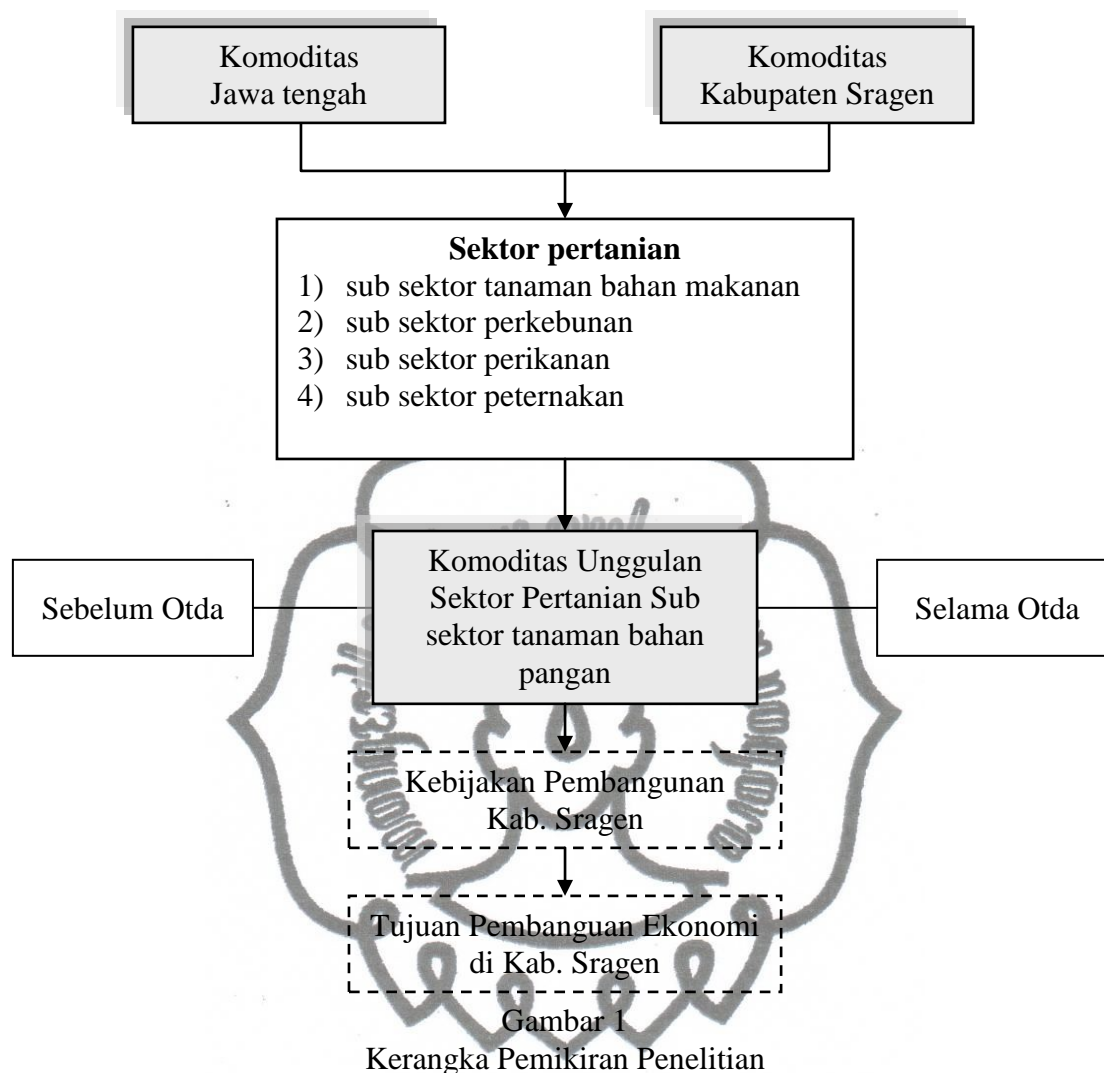
Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dari laju pertumbuhan pendapatan daerah yang bersangkutan sehingga upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pertumbuhan pendapatan suatu daerah ditentukan dengan bagaimana daerah yang bersangkutan berperan sebagai eksportir bagi daerah sekitarnya.

Menurut teori basis ekonomi kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi kegiatan basis dan non basis. Sektor basis merupakan sektor pasar dari dalam maupun dari luar sedangkan sektor non basis adalah sektor yang hanya melayani pasar di daerah itu sendiri.

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan melihat komoditas unggulan sektor pertanian di Kabupaten Sragen sebelum dan selama Otonomi Daerah yaitu pada periode 1997-2009. Sektor pertanian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sub sektor tanaman bahan makanan

Keunggulan suatu daerah yang difokuskan pada komoditas unggulan sektor pertanian sub sektor bahan makanan dapat diketahui dengan membandingkan satu daerah dengan daerah yang lebih tinggi kedudukannya, misal propinsi. Penentuan komoditas unggulan daerah merupakan salah satu faktor kunci pengembangan ekonomi daerah. Penetapan komoditas unggulan yang dilakukan oleh pemerintah daerah biasanya berdasarkan potensi daerah.

Potensi suatu daerah dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Sehingga dapat memudahkan pemerintah daerah untuk merumuskan strategi kebijakan agar mampu melaksanakan pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi daerah.



D. HIPOTESIS

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga terdapat perbedaan komoditas pertanian sub sektor bahan makanan yang menjadi unggulan ekonomi di Kabupaten Sragen sebelum dan selama Otonomi Daerah.
2. Diduga terdapat perbedaan komoditas pertanian sub sektor bahan makanan yang dapat diprioritaskan untuk dikembangkan di Kabupaten Sragen sebelum dan selama Otonomi Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian deskriptif analisis yang menganalisa komoditas unggulan sektor pertanian sub sektor bahan makanan. Adapun wilayah yang diambil sebagai daerah penelitian adalah Kabupaten Sragen. Kurun waktu yang digunakan adalah tahun 1995 sampai 2008. Kurun waktu tersebut dibagi menjadi kurun 1995-2000, dimana tahun tersebut merupakan periode sebelum diterapkan Otonomi Daerah sedangkan kurun waktu 2001-2008 merupakan periode selama diterapkan Otonomi Daerah.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber dengan cara mengambil data-data statistik yang telah ada serta dokumen-dokumen lain yang terkait dan yang diperlukan. Data sekunder diambil dari Dinas Pertanian Kabupaten Sragen, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan buku-buku statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen Sektor penelitian.

C. Teknik Analisis Data

1. Analisis LQ (*Location Quotient*)

Analisis *Location Quotient* digunakan untuk menentukan subsektor unggulan atau ekonomi basis suatu perekonomian wilayah. Subsektor unggulan yang berkembang dengan baik tentunya mempunyai pengaruh yang signifikan

commit to user

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal (Kuncoro, 2004).

Model analisis ini digunakan untuk melihat keunggulan sektor dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya atau dengan wilayah studi dengan wilayah referensi. Analisis *Location Quotient* dilakukan dengan membandingkan distribusi persentase masing-masing sektor di masing-masing wilayah kabupaten atau kota dengan propinsi, (Lincoln, 1999).

Penggunaan pendekatan LQ dimanfaatkan untuk menentukan sebaran komoditas atau melakukan identifikasi wilayah berdasarkan potensinya. Kelebihan metode LQ dalam mengidentifikasi komoditas unggulan antara lain adalah penerapannya sederhana, mudah dan tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit. Kelemahannya adalah data yang digunakan harus akurat. Hasil olahan LQ tidak akan banyak manfaat jika data yang digunakan tidak valid. Oleh karena itu data yang digunakan perlu diklarifikasi dahulu dengan beberapa sumber data lainnya, sehingga mendapatkan konsistensi data yang akurat (Hendayana, 2003).

Rumus (LQ) Location Quotient :

$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

Dimana :

v_i = Komoditas i di tingkat kota / kabupaten Sektor

v_t = Komoditas total di kota / kabupaten Sektor

V_i = Komoditas i di wilayah Propinsi Jawa Tengah

V_t = Komoditas total pada wilayah Propinsi Jawa Tengah

commit to user

Dari hasil perhitungan analisis Location Quotient dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Jika $LQ > 1$, maka komoditas yang bersangkutan di tingkat kota/kabupaten lebih berspesialisasi atau lebih dominan dibandingkan di tingkat propinsi. Komoditas ini dalam perekonomian di tingkat kota/kabupaten memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai komoditas basis.
- 2) Jika $LQ = 1$, maka komoditas yang bersangkutan baik di tingkat kota/kabupaten maupun di tingkat propinsi memiliki tingkat spesialisasi atau dominasi yang sama.
- 3) Jika $LQ < 1$, maka komoditas yang bersangkutan di tingkat kota/kabupaten kurang berspesialisasi atau kurang dominan dibandingkan di tingkat propinsi. Komoditas ini dalam perekonomian di tingkat kota/kabupaten tidak memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai komoditas non basis.

2. Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Dalam model ini ada dua macam rasio yang digunakan untuk membandingkan pertumbuhan sektor dalam suatu wilayah studi maupun wilayah referensi, yaitu :

a. Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR)

Membandingkan laju pertumbuhan sektor i di wilayah referensi dengan laju pertumbuhan total sektor wilayah referensi, dengan rumus (Yusuf dalam Setyowati, 2005):

commit to user

$$RP_R = \frac{\Delta E_{iR} / E_{iR(t)}}{\Delta E_R / E_{R(t)}}$$

Dimana:

ΔE_{iR} = Perubahan pendapatan sektor i wilayah referensi pada awal dan akhir tahun penelitian.

$E_{iR(t)}$ = Pendapatan sektor i wilayah referensi pada awal tahun penelitian.

ΔE_R = Perubahan pendapatan wilayah referensi pada awal dan akhir tahun penelitian.

$E_{R(t)}$ = Pendapatan wilayah referensi pada awal tahun penelitian.

Jika $RP_R > 1$, maka RP_R dikatakan (+), berarti laju pertumbuhan sektor i di wilayah referensi lebih tinggi dari laju pertumbuhan seluruh sektor di wilayah referensi. Demikian juga sebaliknya.

b. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs)

Membandingkan laju pertumbuhan sektor i di wilayah studi dengan laju pertumbuhan sektor sejenis di wilayah referensi, dengan rumus (Yusuf dalam Badriah, 2003):

$$RPs = \frac{\Delta E_y / E_{y(t)}}{\Delta E_{iR} / E_{iR(t)}}$$

Dimana:

ΔE_{ij} = Perubahan pendapatan sektor i di wilayah studi pada awal dan akhir tahun penelitian.

$E_{ij(t)}$ = Pendapatan sektor i di wilayah studi pada awal tahun penelitian.

ΔE_{iR} = Perubahan pendapatan sektor i wilayah referensi pada awal dan akhir tahun penelitian.

$E_{iR(t)}$ = Pendapatan sektor i wilayah referensi pada awal tahun penelitian.

Jika $RPs > 1$, maka RPs dikatakan (+), berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di wilayah studi lebih besar dari laju pertumbuhan sektor tersebut di wilayah referensi. Demikian juga sebaliknya.

Dan hasil analisis MRP dengan melihat nilai RPR dan RPs akan diklasifikasikan sektor-sektor ekonomi dalam empat klasifikasi, yaitu :

- 1) Nilai RPR (+) dan RPs (+) berarti kegiatan sektor tersebut pada tingkat wilayah referensi (propinsi Jawa Tengah) dan tingkat wilayah studi (Kabupaten Sektor) memiliki pertumbuhan yang menonjol.
- 2) Nilai RPR (+) dan nilai RPs (-) berarti sektor tersebut pada tingkat wilayah referensi (Propinsi Jawa Tengah) memiliki pertumbuhan yang menonjol, tetapi tingkat wilayah studi (Kabupaten Sragen) kurang menonjol
- 3) Nilai RPR (-) dan nilai RPs (+) berarti sektor tersebut pada tingkat wilayah referensi (propinsi Jawa Tengah) memiliki pertumbuhan yang kurang menonjol tetapi di tingkat wilayah studi (Kabupaten Sragen) memiliki pertumbuhan yang menonjol.

- 4) Nilai RPR (-) dan nilai RPs (-) berarti sektor tersebut pada tingkat wilayah referensi (propinsi Jawa Tengah) maupun di tingkat wilayah studi (Kabupaten Sragen) memiliki pertumbuhan yang rendah.

3. Analisis Overlay

Menurut Setyowati (2005) model analisis Overlay ini digunakan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi berdasarkan kriteria pertumbuhan (RPs = Rasio Pertumbuhan wilayah studi) dan kriteria kontribusi sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), berarti bahwa sektor tersebut merupakan sektor unggulan karena mempunyai tingkat pertumbuhan dan tingkat kontribusi yang tinggi. Sektor ini layak mendapat proiritas dalam pembangunan.
- b. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), berarti bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang potensial karena walaupun kontribusinya rendah tetapi pertumbuhannya tinggi. Sektor ini sedang mengalami perkembangan yang perlu mendapat perhatian untuk kontribusinya dalam pembentukan PDRB.
- c. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), berarti bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang unggul namun ada kecenderungan menurun karena walaupun kontribusinya tinggi tetapi pertumbuhannya rendah. Sektor ini menunjukkan sedang mengalami penurunan, sehingga perlu dipacu pertumbuhannya.
- d. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), berarti bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang rendah baik dari segi pertumbuhan dan kontribusi. Sektor ini tidak layak mendapat prioritas dalam pembangunan.

D. Definisi Operasional

Variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1 Sektor adalah kegiatan atau lapangan usaha yang berhubungan dengan bidang tertentu atau mencakup beberapa unit produksi yang terdapat dalam suatu perekonomian.
2. Sub sektor adalah unit produksi yang terdapat dalam suatu sektor perekonomian sehingga mempunyai lingkup usaha yang lebih sempit daripada sektor. Sub sektor yang dikaji dalam penelitian ini adalah sub sektor dari sektor pertanian.
3. Sektor pertanian adalah sektor ekonomi yang mempunyai proses produksi khas yaitu proses produksi yang berdasarkan pada proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan hewan. Sektor pertanian dalam penelitian ini adalah sub sektor tanaman bahan makanan
4. Komoditas unggulan adalah komoditas yang diunggulkan suatu daerah yang tumbuh dan berkembang dengan baik karena sesuai dengan agroklimat setempat (kondisi tanah dan iklim).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

E. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Kondisi Geografis Sragen

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Sragen berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur terletak pada $7^{\circ} 15' LS - 7^{\circ} 30' LS$ dan $110^{\circ} 45' BT - 111^{\circ} 10' BT$. Batas batas wilayah Kabupaten Sragen:

Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi (propinsi Jawa Timur)

Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali

Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar

Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan

Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 94.155 km^2 yang terbagi dalam 20 kecamatan, 8 kalurahan, dan 200 desa, terdiri dari Luas Sawah (basah) 39.759 Ha (42,22%) dan Lahan kering 54.396 Ha (57,78%), dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

a. Sebelah selatan Bengawan Solo :

▪ Luas Wilayah : 32.760 ha (34,79 %)

▪ Tanah Sawah : 22.027 ha (54,85 %)

(9 Kec. 88 Desa & Kelurahan)

b. Sebelah utara Bengawan Solo :

▪ Luas Wilayah : 61.395 ha (65,21 %)

▪ Tanah Sawah : 18.102 ha (45,15 %)

(11 Kec. 120 Desa) *commit to user*

Secara fisiologis, wilayah Kabupaten Sragen terbagi atas: Wilayah Kabupaten Sragen berada di dataran dengan ketinggian rata rata 109 M diatas permukaa laut.Sragen mempunyai iklim tropis dengan suhu harian yang berkisar antara 19 31 ° C. Curah hujan rata-rata di bawah 3000 mm per tahun dengan hari hujan di bawah 150 hari per tahun.

Keadaan Alam di Kabupaten Sragen mempunyai relief yang beraneka ragam, ada daerah pegunungan kapur yang membentang dari timur ke barat terletak di sebelah utara bengawan Solo dan dataran rendah yang tersebar di seluruh Kabupaten Sragen, dengan jenis tanah : gromusol, alluvial regosol, latosol dan mediteran.

2. Kependudukan

a. Penduduk

Jumlah penduduk Sragen berdasarkan data tahun 2009 sebanyak 875.423 jiwa, terdiri dari 432,983 penduduk laki laki dan 442.480 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk rata rata 929,86 jiwa/km². Perkembangan penduduk mulai tahun 2002 sampai 2009 berdasarkan jenis kelamin dan usia dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2, jumlah penduduk dan kepadatan tiap kecamatan ditunjukkan Tabel 3.

Tabel 1
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

JENIS DATA	2002 (jiwa)	2003 (jiwa)	2004 (jiwa)	2005 (jiwa)	2006 (jiwa)	2007 (Jiwa)	2008 (Jiwa)	2009 (Jiwa)
Jenis Kelamin								
Laki-laki	421.167	422.217	422.948	424.577	426.096	429.839	431.191	432.983
Perempuan	430.416	431.494	432.296	433.689	435.893	439.563	440.760	442.480
Total	851.583	853.711	855.244	858.266	861.989	869.402	871.951	875.463

Sumber : BPS Sragen Januari 2010

Tabel 2
Jumlah penduduk berdasarkan Usia

JENIS DATA	2002 (jiwa)	2003 (jiwa)	2004 (jiwa)	2005 (jiwa)	2006 (jiwa)	2007 (Jiwa)	2008 (Jiwa)	2009 (Jiwa)
0 - 4 Tahun	69.197	69.372	69.501	84.859	70.027	70.551	70.848	71.170
5 - 14 Tahun	250.910	251.531	252.023	251.721	210.052	162.568	163.221	163.963
15 - 64 Tahun	438.587	439.685	440.466	434.528	487.833	573.333	575.168	577.783
64 Tahun ke atas	92.889	93.123	93.254	87.158	94.077	62.030	62.264	62.547
Total	851.583	853.711	855.244	858.266	861.989	868.482	871.501	875.463

Tabel 3
Luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan tiap kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (/Km ²)
Kalijambe	46,96	46,400	988.07
Plupuh	48,36	46,286	957.11
Masaran	44,04	65,661	1490.94
Kedawung	49,78	59,697	1199.22
Sambirejo	48,43	37,074	766.31
Gondang	41,17	43,617	1059.44
Sambungmacan	38,48	44,026	1144.13
Ngrampal	34,40	36,427	1058.92
Karangmalang	42,98	58,089	1352.48
Sragen	27,27	65,673	2408.25
Sidoharjo	45,89	51,169	1115.04
Tanon	51,00	54,797	1074.45
Gemolong	40,23	46,956	1167.19
Miri	53,81	32,532	604.57
Sumberlawang	75,16	45,543	605.95
Mondokan	49,36	34,267	694.23
Sukodono	45,55	31,451	690.47
Gesi	39,58	21,840	551.79
Tangen	55,13	27,101	491.58
Jenar	63,97	26,857	419.84
TOTAL	941,55	875,463	929.86

Sumber : BPS Sragen Januari 2010

Kepadatan penduduk Kabupaten Sragen tahun 2009 rata-rata sebesar 929,86 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk pada masing-masing kecamatan beragam mulai dari 419,84 (Kecamatan Jenar) sampai 2408,25 jiwa/km² (Kecamatan Sragen).

b. Ketenagakerjaan

Penduduk Usia Kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

Tabel 4
Banyaknya Penduduk Umur 10 Tahun keatas Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sragen Tahun 2006 – 2009.

No	Pekerjaan menurut lapangan usaha	Mata Pencaharian Warga			
		2006	2007	2008	2009
1	Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	243.867 (17.81%)	144.898 (11.37%)	204.000 (15.32%)	197.588 (14.91%)
2	Pertambangan dan penggalian	564.000 (41.19%)	566.000 (44.41%)	565.000 (42.43%)	565.000 (42.63%)
3	Industri pengolahan	26.565 (1.94%)	26.677 (2.09%)	26.621 (2.00%)	26.623 (2.01%)
4	Listrik, gas dan air	327.000 (23.88%)	329.000 (25.81%)	328.000 (24.63%)	328.300 (24.77%)
5	Bangunan	22.615 (1.65%)	22.177 (1.74%)	22.396 (1.68%)	22.397 (1.69%)
6	Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	64.395 (4.70%)	64.667 (5.07%)	64.531 (4.85%)	64.533 (4.87%)
7	Angkutan, pergudangan dan komunikasi	5.966 (0.44%)	5.991 (0.47%)	5.979 (0.45%)	5.923 (0.45%)
8	Keuangan, asuransi, usaha sewa bangunan, tanah dan jasa perusahaan	2.198 (0.16%)	2.207 (0.17%)	2.203 (0.17%)	2.233 (0.17%)
9	Jasa kemasyarakatan	112.533 (8.22%)	113.008 (8.87%)	112.771 (8.47%)	112.776 (8.51%)
Jumlah		1369.139	1274.625	1331.501	1325.373

Sumber : BPS Sragen Januari 2010

commit to user

Penyerapan tenaga kerja paling banyak terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian mencapai 42,63% pada tahun 2009, dan yang paling sedikit pada sektor keuangan, asuransi, usaha sewa bangunan, tanan dan jasa perusahaan yang hanya 0,17%. Ketenagakerjaan penduduk tahun 2002 – 2009 di Kabupaten Sragen ditunjukkan Tabel 5.

Tabel 5
Ketenagakerjaan tahun 2002 – 2009

NO	Ketenagakerjaan	Satuan	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Penduduk 15 tahun keatas	orang	623.001	624.543	625.623	-	-	643.738	645.096
2	Angkatan Kerja	orang	373.371	415.787	450.962	463.301	-	457.210	458.175
3	Setengah Penganggur	orang	244.599	276.421	290.408	-	-	279.358	279.947
4	Penganggur Terbuka	orang	39.730	32.052	7.883	8.665	3.263	6.684	6.544
5	TKI Diluar Negeri	orang	850	1.323	1.727	1.752	602	6.566	6.896
6	PHK	kasus	35	33	10	14	1	5	6
7	Jumlah TK PHK	orang	174	1.111	12	34	1	5	6
8	Rata-rata Kebutuhan Hidup Minimum	rupiah	386.470	411.353	426.158,75	489.141	604.017	643.025	721.103
9	Rata-rata Upah Minimum	rupiah	316.850	357.500	382.500	406.000	485.000	550.000	608.000
10	Pencari Kerja Terdaftar di Disnakertrans	orang	9.105	8.961	8.871	8.665	7.132	6.746	6.544
	Penduduk 15 tahun keatas	orang	623.001	624.543	625.623	-	-	643.738	645.096

Sumber : Disnakertrans 2010

3. Pertanian Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan

Subsektor Tanaman Bahan Makanan di Kabupaten Sragen berperan terhadap peningkatan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesempatan berusaha di pedesaan, serta meningkatkan ekspor komoditas pertanian. Tabel 6 menunjukkan perkembangan luas panen dan produksi pertanian di Kabupaten Sragen Tahun 2004 – 2008.

Tabel 6
Perkembangan Luas Panen dan Produk Pertanian Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan di Kabupaten Sragen Tahun 2004 – 2008.

NO.	PRODUKSI	KETERANGAN	SATUAN	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Padi							
		1). Luas Areal Produksi	ha	84.810	85.739	88.386	90.833	80.204
		2) Jumlah produksi	ton	444.571	457.270	469.467	487.523	451.430
		3) Produksi beras	ton	285.824	243.987	277.350	282.685	263.098
		4) Jumlah konsumsi	ton	97.302	98.346	80.271	80.408	80.978
2.	Jagung							
		1). Luas Areal Produksi	ha	5.687	7.646	6.046	9.726	11.533
		2) Jumlah produksi	ton	21.135	28.606	22.829	53.154	67.017
		3) Jumlah konsumsi	ton	13.812	13.953	14.270	34.876	47.574
3.	Kedelai							
		1). Luas Areal Produksi	ha	1.806	1.962	2.886	1.654	2.573
		2) Jumlah produksi	ton	2.636	2.682	4.151	3.212	3.394
		3) Jumlah konsumsi	ton	9.066	9.158	9.162	8.917	8.937
4.	Industri Pengolahan Hasil Pertanian		Buah	519	519	519	519	519

Sumber : Dinas Pertanian

Perkembangan luas panen pertanian tanaman bahan makanan padi di Kabupaten Sragen dalam lima periode bervariasi dari 80.204 Ha tahun 2004 sampai 90.833 tahun 2007 dan produksi padi bervariasi dari 444.571 ton tahun 2004 sampai 487.523 ton tahun 2008. Meskipun tahun 2008 luas panen paling kecil, akan tetapi produksi paling kecil justru terjadi tahun 2004.

Perkembangan luas panen pertanian tanaman bahan makanan jagung di Kabupaten Sragen dalam lima periode bervariasi dari 5.687 Ha tahun 2004 sampai 11.533 tahun 2008 dan produksi jagung bervariasi dari 21.135 ton tahun 2004 sampai 11.533 ton tahun 2008. Meskipun Tahun 2008 luas panen tanaman jagung paling besar dan produksinya pun juga paling besar.

Perkembangan luas panen pertanian tanaman bahan makanan kedelai di Kabupaten Sragen dalam lima periode bervariasi dari 1.806 Ha tahun 2004 sampai 2.886 tahun 2006 dan produksi kedelai bervariasi dari 2.636 ton tahun

2004 samapi 3.394 ton tahun 2007. Meskipun tahun 2008 luas panen bukan paling besar akan tetapi produksinya paling besar.

F. Hasil Analisis

1. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis *Location Quotient* merupakan alat analisis untuk mengetahui subsektor pertanian unggulan atau ekonomi basis suatu perekonomian wilayah. Berdasarkan hasil perhitungan LQ dari komoditas sektor pertanian pada masa sebelum diterapkan otonomi daerah (tahun 1997-2000) maupun selama diterapkan otonomi daerah (tahun 2001-2008) di Kabupaten Sragen didapatkan hasil sebagai berikut :

a. Masa Sebelum diterapkan Otonomi Daerah

Tabel 7 menunjukkan hasil perhitungan LQ dari komoditas sektor pertanian pada masa sebelum diterapkan otonomi daerah (tahun 1997-2000).

Tabel 7
Hasil Perhitungan *Location Quotient*
Kabupaten Sragen Tahun 1997-2000

Komoditas TOBAMA	1997	1998	1999	2000	Rata-rata	Keterangan
Padi	1.286	1.315	1.280	1.295	1.294	Basis
Jagung	0.283	0.316	0.293	0.298	0.298	Non Basis
Kedelai	0.266	0.280	0.289	0.265	0.275	Non Basis
Kacang Tanah	4.473	5.642	4.246	5.213	4.893	Basis
Kacang Hijau	0.861	1.090	0.992	1.250	1.048	Basis
Ubi Kayu	0.569	0.543	0.638	0.585	0.584	Non Basis
Ubi Jalar	0.011	0.005	0.007	0.006	0.007	Non Basis

Data Sekunder diolah (2010)

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata LQ dalam kurun waktu sebelum diterapkan otonomi daerah (tahun 1997-2000), dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Sragen terdapat komoditas subsektor tanaman bahan makanan yang teridentifikasi sebagai basis, yaitu : Padi, Kacang Tanah dan Kacang Hijau karena memiliki indek LQ > 1.

b. Masa Selama diterapkan Otonomi Daerah

Tabel 8 menunjukkan hasil perhitungan LQ dari komoditas sektor pertanian pada masa selama diterapkan otonomi daerah (tahun 2001-2008).

Tabel 8
Hasil Perhitungan *Location Quotient*
Kabupaten Sragen Tahun 2001-2008

Komoditas TOBAMA	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Rata rata	Keterangan
Padi	1.301	1.274	1.327	1.328	1.363	1.291	1.280	1.322	1.311	Basis
Jagung	0.300	0.298	0.307	0.293	0.328	0.295	0.294	0.304	0.302	Non Basis
Kedelai	0.393	0.497	0.492	0.589	0.403	0.753	0.741	0.894	0.595	Non Basis
Kacang Tanah	4.800	4.842	4.888	4.939	4.114	3.802	5.077	4.430	4.612	Basis
Kacang hijau	1.265	1.074	1.076	0.889	1.130	1.001	1.236	1.282	1.119	Basis
Ubi Kayu	0.556	0.569	0.599	0.588	0.563	0.644	0.578	0.564	0.583	Non Basis
Ubi Jalar	0.007	0.013	0.012	0.004	0.039	0.010	0.016	0.008	0.014	Non Basis

Data Sekunder diolah (2010)

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata LQ dalam kurun waktu selama diterapkan otonomi daerah (tahun 2001-2008), dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Sragen terdapat komoditas subsektor tanaman bahan makanan yang teridentifikasi sebagai basis, yaitu : Padi, Kacang Tanah dan Kacang Hijau karena memiliki indek LQ > 1.

Berdasarkan Tabel 7 dan tabel 8 dapat dibandingkan hasil perhitungan *Location Quotient* pada saat sebelum dan setelah otonomi daerah yang ditunjukkan pada Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9
Hasil Perhitungan *Location Quotient* Kabupaten Sragen
sebelum dan selama otonomi daerah

Komoditas TOBAMA	Sebelum OTDA		Selama OTDA	
	LQ	Nominal	LQ	Nominal
Padi	1.294	Basis	1.311	Basis
Jagung	0.298	Non Basis	0.302	Non Basis
Kedelai	0.275	Non Basis	0.595	Non Basis
Kacang Tanah	4.893	Basis	4.612	Basis
Kacang hijau	1.048	Basis	1.119	Basis
Ubi Kayu	0.584	Non Basis	0.583	Non Basis
Ubi Jalar	0.007	Non Basis	0.014	Non Basis

2. Analisis Model Ratio Pertumbuhan

Untuk mendukung dari hasil analisis LQ dalam menentukan deskripsi kegiatan ekonomi yang dominan atau potensial bagi Kabupaten Sragen dalam penelitian ini, maka digunakan pula alat analisis MRP. Pada dasarnya alat analisis MRP sama dengan LQ, namun letak perbedaannya pada kriteria penghitungannya. Pada analisis LQ penghitungannya menggunakan kriteria kontribusi, sedangkan analisis MRP menggunakan kriteria pertumbuhan.

Menurut model MRP ini ada dua macam rasio yang digunakan yaitu Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs). Apabila RPR maupun RPs lebih besar dari satu maka disebut memiliki nilai nominal (+) dan bila RPR dan RPs kurang dari satu maka disebut

memiliki nilai nominal (-). Berdasarkan hasil perhitungan MRP pada masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah (tahun 1997-2000) dan selama otonomi daerah (tahun 2001-2008) di Kabupaten Sragen, didapat basil sebagai berikut :

a. Masa Sebelum diterapkannya Otonomi Daerah

Tabel 10 menunjukkan hasil perhitungan Model Ratio Pertumbuhan (MRP) di Kabupaten Sragen sebelum diterapkannya otonomi daerah. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa RPr yang bernilai positif hanya untuk komoditas jagung dan kacang tanah, sedangkan nilai RPs semuanya negatif (-).

Tabel 10
Hasil Perhitungan Model Ratio Pertumbuhan
Kabupaten Sragen Tahun 1997-2000

Komoditas	MRP			
	RPr		RPs	
	Riil	Nominal	Riil	Nominal
PADI	0.554815	(-)	0.090	(-)
JAGUNG	10.27627	(+)	0.912	(-)
KEDELAI	-0.44975	(-)	0.004	(-)
KACANG TANAH	6.479435	(+)	0.237	(-)
KACANG HIJAU	-2.03073	(-)	0.834	(-)
UBI KAYU	-1.45413	(-)	-0.011	(-)
UBI JALAR	-3.12907	(-)	-1.066	(-)

Sumber: Data Sekunder diolah (2010)

Keterangan :

RPr = Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi.

RPs = Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi

b. Masa Selama diterapkannya Otonomi Daerah

Tabel 11 menunjukkan hasil perhitungan Model Ratio Pertumbuhan (MRP) di Kabupaten Sragen selama diterapkannya otonomi daerah.

Tabel 11
Hasil Perhitungan Model Ratio Pertumbuhan
Kabupaten Sragen Tahun 2001-2008

Komoditas	MRP			
	RPr		RPs	
	Riil	Nominal	Riil	Nominal
PADI	0.38292541	(-)	0.097283502	(-)
JAGUNG	3.351963113	(+)	0.719156713	(-)
KEDELAI	-4.530532999	(-)	3.420295809	(+)
KACANG TANAH	2.860479691	(+)	-0.395173829	(-)
KACANG HIJAU	0.025892975	(-)	0.005555284	(-)
UBI KAYU	1.699788705	(+)	0.364686131	(-)
UBI JALAR	-0.420572773	(-)	0.097283502	(-)

Sumber: Data Sekunder diolah (2010)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa RPr yang bernilai positif adalah untuk komoditas jagung, kacang tanah dan ubi kayu, sedangkan nilai RPs bernilai positif pada komoditas kedelai, yang lainnya negatif (-).

3. Analisis Overlay

Analisis ini digunakan untuk menentukan komoditas unggulan maupun potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan (MRP/RPs) dan kriteria kontribusi (LQ). Dengan mempertimbangkan kedua kriteria tersebut, penentuan kegiatan ekonomi yang unggul dan potensial dapat lebih.

a. Masa Sebelum diterapkannya Otonomi Daerah

Tabel 12 menunjukkan hasil perhitungan overlay di Kabupaten Sragen sebelum diterapkannya otonomi daerah.

Tabel 12
Hasil perhitungan Overlay Kabupaten Sragen 1997 – 2000

Komoditas	RPs		LQ		Total
	Riil	Nominal	Riil	Nominal	
PADI	0.0972	(-)	1.294	(+)	(-)(+)
JAGUNG	0.7191	(-)	0.298	(-)	(-)(-)
KEDELAI	3.4202	(+)	0.275	(-)	(+)(-)
KACANG TANAH	-0.3951	(-)	4.893	(+)	(-)(+)
KACANG HIJAU	0.0055	(-)	1.048	(+)	(-)(+)
UBI KAYU	0.3646	(-)	0.584	(-)	(-)(-)
UBI JALAR	0.0972	(-)	0.007	(-)	(-)(-)

Sumber: Data Sekunder diolah (2010)

b. Masa Selama diterapkannya Otonomi Daerah

Tabel 13 menunjukkan hasil perhitungan overlay di Kabupaten Sragen selama diterapkannya otonomi daerah.

Tabel 13
Hasil perhitungan Overlay Kabupaten Sragen 2001– 2008

Komoditas	RPs		LQ		Total
	Riil	Nominal	Riil	Nominal	
PADI	0.09728	(-)	1.311	(+)	(-)(+)
JAGUNG	0.71915	(-)	0.302	(-)	(-)(-)
KEDELAI	3.42029	(+)	0.595	(-)	(+)(-)
KACANG TANAH	-0.39517	(-)	4.612	(+)	(-)(+)
KACANG HIJAU	0.00555	(-)	1.119	(+)	(-)(+)
UBI KAYU	0.36468	(-)	0.583	(-)	(-)(-)
UBI JALAR	0.0972	(-)	0.014	(-)	(-)(-)

Sumber: Data Sekunder diolah (2010)

G. Pembahasan

1. Analisis *Location Quotient* (LQ)

a. Sebelum Otonomi Daerah

Komoditas yang teridentifikasi sebagai komoditas basis di Kabupaten Sragen pada masa sebelum diterapkan otonomi daerah tahun 1997-2000, yaitu subsektor tanaman bahan makanan yang terdiri dari komoditas padi, kacang tanah dan kacang hijau.

Komoditas yang menjadi basis di Kabupaten Sragen tersebut dapat menjadi sumber pertumbuhan. Komoditas tersebut tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan di wilayah Kabupaten Sragen tetapi juga dapat diekspor keluar wilayah. Penjualan keluar wilayah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah. Peningkatan pendapatan dari komoditas basis juga dapat digunakan untuk mendorong perkembangan komoditas non basis agar menjadi komoditas basis. Oleh karena itu, komoditas yang menjadi basis inilah yang layak dikembangkan di Kabupaten Sragen.

b. Selama Otonomi Daerah

Komoditas yang teridentifikasi sebagai komoditas basis di Kabupaten Sragen selama diterapkan otonomi daerah tahun 2001-2008, yaitu subsektor tanaman bahan makanan yang terdiri dari komoditas padi, kacang tanah dan kacang hijau. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga komoditas tersebut dapat dipertahankan baik sebelum maupun pada masa otonomi daerah.

Komoditas kedelai meskipun belum menjadi basis akan tetapi hal ini perlu menjadi perhatian tersendiri melihat indek LQ sebelum otonomi daerah hanya 0,27 dan selama otonomi daerah naik menjadi 0,59. Hal ini

menjadikan kedelai berpotensi untuk menjadi basis. Pengembangan komoditas pertanian harus disesuaikan dengan keadaan alam sekitar dan harus memperhatikan dampak negatif yaitu kerusakan lingkungan.

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa antara masa sebelum maupun selama diterapkan otonomi daerah, komoditas subsektor yang tergolong dalam klasifikasi komoditas basis tidak berbeda. Komoditas yang pada masa sebelum diterapkan otonomi daerah telah menjadi basis di Kabupaten Sragen tetap bertahan menjadi komoditas basis pada masa selama diterapkan otonomi daerah tahun 2001-2008 yaitu padi, kacang tanah dan kacang hijau.

Hasil penelitian penelitian ini mendukung penelitian Hendayana (2003) tentang Aplikasi Metode *Location Quotient* (LQ) Dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. Penentuan komoditas unggulan nasional dan daerah merupakan langkah awal menuju pembangunan pertanian yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi globalisasi perdagangan.

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian Hendayana (2003) yang menemukan menemukan bahwa 1) Metoda LQ sebagai salah satu pendekatan model ekonomi basis, relevan dan dapat digunakan sebagai salah satu teknik untuk mengidentifikasi penyebaran komoditas pertanian. Dalam hal ini komoditas yang memiliki nilai $LQ > 1$ dianggap memiliki keunggulan komparatif karena tergolong basis. Komoditas pertanian yang tergolong basis dan memiliki sebaran wilayah paling luas menjadi salah satu indikator komoditas unggulan nasional, 2) perhitungan LQ baru didasarkan aspek luas

areal panen atau areal tanam, maka keunggulan yang diperoleh baru mencerminkan keunggulan dari sisi penawaran, belum dari sisi permintaan. Untuk mendapatkan keunggulan dari penawaran dan permintaan analisis masih perlu dilanjutkan dengan memasukkan unsur ekonomi antara lain keragaan ekspor dan impor. 3) Metode LQ memiliki kelebihan dalam hal penyelesaiannya yang mudah dilakukan, akan tetapi juga memiliki keterbatasan terutama bila menyangkut deliniasi wilayah yang acuannya tidak jelas.

2. Analisis Model Ratio Pertumbuhan

a. Masa sebelum diterapkannya Otonomi Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan MRP pada tabel 9, maka dengan melihat dan membandingkan nilai RPR dan nilai RPs dapat diketahui komoditas apa saja yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Sragen dan Propinsi Jawa Tengah pada masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah (tahun 1997-2000). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, setiap komoditas diklasifikasikan sesuai dengan analisis MRP yang memberikan empat klasifikasi sebagai berikut :

- 1) Komoditas pada tingkat Propinsi Jawa Tengah dan pada tingkat Kabupaten Sragen memiliki pertumbuhan yang menonjol pada subsektor Tanaman Bahan Makanan belum ada
- 2) Komoditas yang pada tingkat Propinsi Jawa Tengah memiliki pertumbuhan yang menonjol, tetapi di tingkat Kabupaten Sragen kurang

menonjol (kategori kedua), yaitu subsektor Tanaman Bahan Makanan meliputi jagung dan kacang tanah.

- 3) Komoditas pada tingkat Jawa Tengah memiliki pertumbuhan yang kurang menonjol tetapi di Kabupaten Sragen memiliki pertumbuhan yang menonjol juga tidak ada.
- 4) Komoditas yang pertumbuhannya kurang menonjol, baik pada tingkat Propinsi Jawa Tengah maupun tingkat Kabupaten Sragen, yaitu: padi, kedelai, kacang hijau ubi kayu dan ubi jalar.

b. Masa Selama diterapkannya Otonomi Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan MRP pada Tabel 11, maka dengan melihat dan membandingkan nilai RPR dan nilai RPs dapat diketahui komoditas apa saja yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Sragen dan Propinsi Jawa Tengah pada masa selama pelaksanaan otonomi daerah (tahun 2000-2008). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, setiap komoditas diklasifikasikan sesuai dengan analisis MRP yang memberikan empat klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Komoditas pada tingkat Propinsi Jawa Tengah dan pada tingkat Kabupaten Sragen memiliki pertumbuhan yang menonjol pada subsektor Tanaman Bahan Makanan belum ada
- 2) Komoditas yang pada tingkat Propinsi Jawa Tengah memiliki pertumbuhan yang menonjol, tetapi di tingkat Kabupaten Sragen kurang menonjol (kategori kedua), yaitu subsektor Tanaman Bahan Makanan meliputi jagung, kacang tanah dan kacang hijau. Hal ini berarti ada

penambahan pertumbuhan yang baik pada tingkat provinsi Jawa Tengah selama otonomi daerah.

- 3) Komoditas pada tingkat Jawa Tengah memiliki pertumbuhan yang kurang menonjol tetapi di Kabupaten Sragen memiliki pertumbuhan yang menonjol adalah kedelai. Hal ini menjadikan kedelai sebagai komoditas yang memiliki pertumbuhan paling menonjol di Kabupaten Sragen.
- 4) Komoditas yang pertumbuhannya kurang menonjol, baik pada tingkat Propinsi Jawa Tengah maupun tingkat Kabupaten Sragen, yaitu: padi, ubi kayu dan ubi jalar.

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian hasil penelitian Syafruddin, *et al.*, (2004) pada deliniasi peta zona agroekologi wilayah Sulawesi Tengah skala 1:250.000 didapatkan tujuh zona utama, empat sistem pertanian, dan beberapa jenis tanaman alternatif. Komoditas unggulan juga telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah kabupaten, yaitu kakao, jagung, bawang merah, sapi potong, serta perikanan laut.

3. Analisis Overlay

Berdasarkan hasil perhitungan analisis Overlay pada Tabel 12 diatas, maka dapat dilihat komoditas unggulan maupun potensidi Kabupaten Sragen berdasairkan kriteria pertumbuhan (MRP/RPs) dan kriteria kontribusi (LQ) pada masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah (tahun 1997-2000). Hasil penelitian

tersebut kemudian setiap subsektornya diklasifikasikan sesuai dengan analisis Overlay yang memberikan klasifikasi sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), merupakan suatu sektor/subsektor yang dominan, baik dari segi pertumbuhan maupun dari segi kontribusi, berarti sektor/subsektor tersebut sebagai sektor/subsektor unggulan di Kabupaten Sragen. Sektor/subsektor yang termasuk dalam klasifikasi ini tidak ada.
- 2). Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), berarti bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang potensial karena walaupun kontribusinya rendah tetapi pertumbuhannya tinggi. Sektor ini sedang mengalami perkembangan. Subsektor yang termasuk kategori ini yaitu komoditas kedelai.
- 3) Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), merupakan sektor/subsektor yang memiliki pertumbuhan yang kecil tetapi kontribusinya besar. Sektor/subsektor ini dimungkinkan sebagai sektor/subsektor yang sedang mengalami penurunan. Subsektor yang termasuk kategori ini, yaitu Tanaman Bahan Makanan meliputi : padi, kacang tanah dan kacang hijau.
- 4) Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), merupakan suatu sektor/subsektor yang tidak dominan baik dari segi pertumbuhan maupun segi kontribusi. Sektor/subsektor yang termasuk kategori ini, yaitu Subsektor Tanaman Bahan Makanan : jagung, ubi jalar dan ubi kayu.

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian penelitian Mukhyi, (2007) tentang Analisis Peranan Subsektor Pertanian dan Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Propinsi Jawa Barat : Pendekatan Analisis IRIO (*Interregional Input-Output*). Penelitian ini membahas permasalahan sektor pertanian di Propinsi Jawa Barat dan sektor-sektor unggulan yang ada di

Propinsi Jawa Barat kaiannya dengan pembangunan kawasan ekonomi, dengan menggunakan pendekatan IRIO (*Interregional Input-Output*) yang merupakan metode pengembangan dari *Input-Output Analysis*.

Hasil penelitian Mukhyi, (2007) menunjukkan bahwa 1) Tingkat kontribusi margin sektor di Propinsi Jawa Barat adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian (pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan) yang mempunyai nilai di atas 10% dari total PDRBnya. Sektor industri pengolahan masuk dalam tahap semi industrialisasi karena nilainya di atas 20% dari total PDRB Jawa Barat. Dalam sektor pertanian ada satu subsektor tanaman bahan makanan masuk dalam tahap menuju proses industrialisasi. Sektor dan subsektor lainnya masih dalam tahap non industrialiasi. Secara nasional tingkat kontribusi margin sektor adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian (pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan) yang mempunyai nilai di atas 10% dari total PDB nasional. Sektor industri pengolahan masuk dalam tahap semi industrialisasi karena nilainya di atas 20% dari total PDB nasional. Produk-produk sekunder atau produk-produk lanjutan dari produk primer pertanian adalah pendukung dari sektor-sektor unggulan Propinsi Jawa Barat. Serta sektor dan subsektor lainnya selain sektor pertanian yang dalam golongan non industrialisasi. 2) Sektor yang memiliki nilai multiplier besar terhadap perekonomian secara nasional sesuai dengan sektor unggulan Propinsi Jawa Barat, yaitu subsektor peternakan dan hasil-hasilnya; subsektor industri makanan, minuman dan tembakau; subsektor industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya; subsektor industri kertas dan barang dari cetakan, subsektor

industri semen; subsektor industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi; subsektor industri barang dari logam, subsektor industri lainnya; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; subsektor hotel dan restoran; subsektor angkutan darat, subsektor angkutan air dan subsektor angkutan udara.

3) Sektor dan subsektor unggulan Propinsi Jawa Barat berdasarkan analisis IRIO adalah sektor industri pengolahan, sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Bila dilihat dari subsektornya adalah subsektor industri pengilangan minyak bumi; subsektor makanan, minuman dan tembakau; subsektor industri kertas dan barang dari cetakan; subsektor industri pupuk kimia dan barang dari karet dan mineral bukan logam; sektor bangunan dan subsektor hotel dan restoran. Tetapi dibandingkan dengan sektor dan subsektor unggulan secara nasional, maka sektor dan subsektor unggulan Propinsi Jawa Barat adalah subsektor makanan, minuman dan tembakau; subsektor industri kertas dan barang dari cetakan; subsektor industri pupuk kimia dan barang dari karet dan mineral bukan logam; sektor bangunan dan subsektor hotel dan restoran. Walaupun sektor pertanian bukan sektor unggulan akan tetapi menjadi pendorong dari sektor-sektor unggulan, yang merupakan proses lebih lanjut dari hasil produk-produk pertanian yang dilakukan proses produksi lagi yang bisa memberikan nilai tambah yang besar terhadap pendapatan daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian studi yang telah dipaparkan khususnya di bagian hasil analisis dan pembahasan dapat diberikan suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan analisis *Location Quotients* pada masa sebelum diterapkan otonomi daerah tahun 1997-2000, komoditas yang teridentifikasi sebagai komoditas basis di Kabupaten Sragen, yaitu subsektor Tanaman Bahan Makanan terdiri dari padi, jagung dan kacang hijau dan ketiga tanaman tersebut dapat dipertahankan selama otonomi daerah tahun 2001 – 2008.
2. Berdasarkan hasil analisis MRP diketahui bahwa komoditas yang pada tingkat Propinsi Jawa Tengah memiliki pertumbuhan yang menonjol, tetapi di tingkat Kabupaten Sragen kurang menonjol, pada masa sebelum diterapkan otonomi daerah tahun 1997-2000 adalah yaitu subsektor tanaman bahan makanan meliputi jagung dan kacang tanah dan selama otonomi daerah 2001 – 2008 subsektor Tanaman Bahan Makanan meliputi jagung, kacang tanah dan kacang hijau menjadi memiliki pertumbuhan yang baik pada tingkat provinsi Jawa Tengah selama otonomi daerah.
3. Berdasarkan analisis *Overlay* menunjukkan bahwa pada masa sebelum diterapkan otonomi daerah pada tahun 1997-2000 komoditas dominan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sragen karena memenuhi kriteria pertumbuhan positif meskipun kontribusinya masih kecil belum ada, akan tetapi selama otonomi daerah tahun 2001 – 2008 kedelai menjadi komoditas pada

tingkat Jawa Tengah memiliki pertumbuhan yang kurang menonjol tetapi di Kabupaten Sragen memiliki pertumbuhan yang menonjol.

4. komoditas pertanian sub sektor tanaman bahan pangan yang dapat diprioritaskan untuk dikembangkan di Kabupaten Sragen selama Otonomi Daerah adalah tanaman bahan pangan kedelai.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan-kesimpulan penelitian di atas, maka dapat di kemukakan saran-saran. sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Sragen diharapkan dapat mempertahankan dan mengembangkan komoditas yang menjadi unggulan untuk peningkatan pendapatan daerah, ekspor komoditas unggulan pertanian dan diharapkan juga dapat merangsang komoditas lain yang kurang dapat memberikan kontribusinya terhadap pembangunan daerah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Sragen diharapkan dapat mengembangkan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha pertanian yaitu dengan cara pengembangan teknologi, membangun sarana irigasi, ketersediaan lahan, penyediaan modal bagi pelaku produsen, dan sarana pendukung seperti transportasi dan komunikasi.
3. Kabupaten Sragen ternyata dari sisi kontribusi mampu menunjukkan hasil yang baik itu sebelum atau sesudah otonomi didominasi tanaman tradisional padi, jagung dan kacang tanah. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemda Sragen agar dikemudian hari dikembangkan.

4. Pemerintah daerah Kabupaten Sragen. hendaknya menggerakkan pembangunan pertanian yaitu dengan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pelaku produsen pertanian yaitu dengan cara memasarkan hasil-hasil komoditas pertanian seperti menjalin kerjasama atau kemitraan dengan para pedagang atau pengusaha sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian.
5. Pemerintah daerah sebaiknya membuat sebuah buku pedoman untuk para investor yang nantinya dapat memberikan masukan sebagai data acuan untuk berbisnis di bidang pertanian khususnya di Kabupaten Sragen.
6. Pemerintah daerah hendaknya perlu melakukan pengembangan penelitian untuk mencari komoditas unggulan di luar sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman bahan makanan.

C. Implikasi Manajerial

Bagi pemda memberikan kepada dinas instansi terkait, dinas peternakan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Pertanian maka perlu memberikan pelatihan-pelatihan agribisnis berkualitas ekspor dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kredibilitas budi daya agribisnis milik Pemerintah yang bergerak dibidang agribisnis yang berkualitas ekspor.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya membataskan pada komoditas pertanian sektor bahan makanan, untuk ke depannya alangkah lebih baiknya jika seluruh sektor pertanian dijadikan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abdul Aziz. 2008. Sektor-Sektor Ekonomi Potensial di Wilayah Papua. *Jurnal Dinamika*, Vol. 3, No.2: 61-72.
- Boediono, 2000. *Ekonomi Mikro*. BPFE. Yogyakarta.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Hendayana, Rachmat 2003. Aplikasi Metode *Location Quotient* (LQ) dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. *Jurnal Informatika Pertanian*. Vol. 12.
- Hendayana, Rachmat. 2003. Aplikasi Metode *Location Quotient* (LQ) DALAM Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. *Informatika Pertanian*. Vol.12 (Desember): 1 – 21.
- Henny Mayrowani.2006. Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Perdagangan Hasil Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 4 No. 3 : 212-225
- Herliana, L. 2004. Peranan Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Indonesia : Analisis Dekomposisi Sistem Neraca Sosial Ekonomi. Tesis. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Irawan, Andi. 2005. Analisis Perilaku Sektor Pertanian Indonesia: Aplikasi Vektor Error Corection Model. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vo1.20, No.3: 250-269.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Lincoln Arsyad,. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonom,J Daerah*. BPFE : Yogyakarta.
- Listiarini, Dyah dan Ropingi. 2003. Penentuan Sektor Unggulan di Kabupaten Pati Berdasar Analisis LQ dan Shift Share. *Jurnal Perekonomian Pembangunan*, Vo1.3, No.2 :57-70.
- Mohammad Abdul Mukhyi. 2007. Analisis Peranan Subsektor Pertanian Dan Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Propinsi Jawa Barat: Pendekatan Analisis IRIO. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 1: 1-9
- Mukhyi, M Abdul. 2007. Analisis Peranan Subsektor Pertanian dan Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Propinsi Jawa Barat : Pendekatan Analisis IRIO. *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 5 (1): 2 – 10.

- Purwaningsih., Yunastiti. 2008. Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal EkonomiPemhangunan*, Vol. 9, No.1: 1-27.
- Paul A Samuelson dan William D Nourdhous. 1996. *Mikro Ekonomi*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Rachmat Hendayana. 2003. Aplikasi Metode *Location Quotient* (LQ) Dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional . *Informatika Pertanian*. Volume 12 (Desember) : 1-21
- Richardson, Harry. 1973. *Dasar Dasar Ekonomi Regional*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Ropingi dan Agustono. 2006. Efek Alokasi dan Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Menghadapi Otonomi Daerah di Kabupaten Boyolali. *SEPA*, Vol. 2 No.2: 117-127.
- Ropingi dan Agustono. 2007. Pembangunan Wilayah Kecamatan Berbasis Komoditas Pertanian di Kabupaten Boyolali (pendekatan Shiff-Share Analisis). *SEPA*, Vol. 4 No.1: 61-70.
- Sadono, Sukimo. 1996. *Pengantar Teori Mikro Edisi 2*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Safi'i, 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*. Penerbit Averroes Press: Malang.
- Salim, Emil, 1986, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES. Jakarta. Salvatore, Dominick. 1995. *Teori Mikro edisi ketiga*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Setyowati, Nuning dan Mei Tri Sundari. 2005. Analisis Kemampuan Ekspor Komoditas Pertanian di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten dengan Pendekatan Analisis Location Quotient. *SEPA*, Vol. 2 No.1: 57-63.
- Setyowati, Nuning dan Mei Tri Sundari. 2006. Analisis Basis Ekonomi Sektor Pertanian di Kabupaten Karanganyar dengan Pendekatan Analisis Location Quotient. *SEPA*, Vo12, No 2: 95-100.
- Siti Badriah, tHis. 2003. Identifikasi Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan di Propinsi Jawa Tengah. *JEBA*, VoI.5, No.2: 139-155.
- Sugiarto, dkk. 2002. *Ekonomi Mikro: Sebuah Kajian Komprehensij*. PT Gramedia Pustaka Tama: Jakarta.
- Sugiyanto, Catur. 2007. Strategi Penyusunan Komoditas Unggulan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. VoI.22, No.4: 369-385.

Syafruddin, Agustinus N. Kairupan, A. Negara, dan J. Limbongan. 2004. Penataan Sistem Pertanian Dan Penetapan Komoditas Unggulan Berdasarkan Zona Agroekologi Di Sulawesi Tengah. *Jurnal Litbang Pertanian*, 23(2), :61-67

Tjokroaminoto, Bintoro. 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Teguh Prasetyo, et.al . 2010. *Analisis Kebijakan Pengembangan Komoditas Pertanian Strategis Di Jawa Tengah (2009)*, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah.

Todaro Michael P. 2000 (penerjemah: Drs. Haris Munandar). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* Edisi Ketujuh. Jilid satu. Erlangga: Jakarta.

Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Yunastiti Purwaningsih. 2008. Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9, No.1: 1-27.

